



OPD Jadi Sasaran Pemangkasan

■ Ramai-Ramai Refokusing Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis

Kalau dilihat dari mekanisme APBN Rp71 triliun, setidaknya tidak semua dibebankan ke APBD di masing-masing daerah.

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah wilayah di DIY melakukan refokusing anggaran untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski melakukan refokusing, pemerintah daerah berharap ada kucuran anggaran dari APBN ke daerah yang totalnya mencapai Rp71 triliun.

Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp105 miliar untuk menunjang program tersebut. Namun, MBG sampai sejauh ini belum digulirkan di Kota Yogya, meski pelaksanaannya telah dijadwalkan secara nasional.

● ke halaman 11

BIJAK ALOKASIKAN DANA

- Sejumlah wilayah di DIY melakukan refokusing anggaran untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pemerintah daerah tetap berharap ada kucuran anggaran dari APBN ke daerah yang totalnya mencapai Rp71 triliun.
- Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp105 miliar.
- Alokasi tersebut disiapkan untuk menopang MBG selama 8 bulan ke depan.
- Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar.
- Refokusing anggaran ini disebut tidak menggeser program prioritas lain yang telah direncanakan.
- Pemkab Kulon Progo telah menyiapkan Rp29,5 miliar.
- Dana tersedia Rp14,4 miliar, kekurangannya yang sekitar Rp15,1 miliar.



GRAFIS/FAUZIA RAKHMAT

OPD Jadi

● Sambungan Hal 1

nal mulai Senin (6/1).

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan, mengungkapkan, alokasi tersebut disiapkan untuk menopang MBG selama 8 bulan ke depan. Angka Rp105 miliar pun didapat setelah proses refokusung dilakukan, menasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta.

"Total nilainya sekitar Rp105 miliar, itu baru untuk 8 bulan. Belum tersedia untuk 1 tahun," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/1).

Sehingga, Oleg tidak menutup kemungkinan, bakal ada tambahan alokasi anggaran untuk MBG lewat APBD perubahan pertengahan tahun nanti. "Mekanismenya kan kami belum tahu, apakah nanti anggaran dari pusat semua, atau dari masing-masing daerah harus menyedekikan anggaran tersebut," terangnya.

"Kalau dilihat dari mekanisme APBN Rp71 triliun, setidaknya tidaknya tidak semua dibebankan ke APBD di masing-masing daerah," tambah politikus Partai NasDem tersebut.

Lebih lanjut, ia menyebut, berdasar hasil pantauannya, program makan bergizi gratis di Kota Yogyakarta sampai sejauh ini masih dalam tahap persiapan. Menurutnya, buruh pemernatan dari dinas-dinas terkait, supaya program inisiasi pemerintah pusat itu benar-benar berjalan dengan baik.

"Harapan kami nanti tidak terjadi hal-hal yang kemudian menjadi rancu, karena semua infrastruktur seharusnya sudah terpenuhi, mulai dari gizi, tenaga gizi, tenaga audit, tenaga dapur, seperti itu,"

pungkasnya.

Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, sebelumnya mengatakan, rangkaian uji coba MBG seperti daerah lain pun belum pernah dilakukan di sekolah-sekolah di wilayahnya.

Sehingga, pihaknya tidak bisa memberikan banyak tanggapan, karena memang belum menerima *update* apapun terkait program tersebut.

"Saya belum tahu, mungkin daerah lain, karena ada percontohan-percontohan. Karena (di Kota Yogyakarta) anggaran juga belum diformat masuk anggaran apa, kan belum itu. Makanya, saya belum bisa komentar banyak, masih menunggu," tandasnya.

Untuk mengakomodasi total 71 ribu siswa TK, SD dan SMP di Kota Yogyakarta, lanjut Budi, jelas dibutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. "Jumlah siswa 71 ribu itu, kalau dikali Rp10 ribu, kan Rp710 juta. Dikali 20 hari saja, misalnya, terus kali 10 bulan, sudah Rp152 miliar. Itu misalnya, hitungan kasarnya," ungkapnya.

Kontribusi

Sementara itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar. Dana ini menjadi bagian dari kontribusi DIY terhadap program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMN dan program percepatan.

Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan, kontribusi daerah ini telah tercantum dalam pedoman penyusunan APBD 2025. "Dalam pedoman itu disebutkan bahwa daerah diminta ikut berkontribusi berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing. Untuk DIY, kontribusi dihitung sebesar 2,5 persen dari Pen-

dapatan Asli Daerah (PAD)," ungkap Ni Made, Senin (6/1).

Anggaran Rp42 miliar ini telah diposisikan dalam beberapa pos, termasuk di Dikpora DIY, meskipun juklak dan juknis pelaksanaan dari pusat belum diterima. "Secara teknis, program ini masih ditangani langsung oleh pusat melalui Badan Gizi Nasional. Kami di daerah sejauh ini hanya menyiapkan anggaran dan memetakan potensi lokal," lanjutnya.

Ni Made menambahkan, beberapa waktu lalu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memanggil jajaran terkait untuk mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten 2 DIY. Rapat tersebut membahas pemetaan program, termasuk potensi daerah dalam mendukung ketersediaan bahan baku makanan bergizi gratis.

Dalam mendukung program ini, Bappeda DIY telah mengidentifikasi potensi sektor pertanian dan perikanan. Ni Made memastikan bahwa DIY memiliki surplus produksi padi yang mencapai 546 ribu ton per tahun, jauh melebihi kebutuhan program yang diperkirakan sekitar 10,6 ribu ton per tahun.

Meski alokasi anggaran telah tersedia, Pemda DIY belum menerima informasi detail terkait implementasi di lapangan. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memimpin pelaksanaan teknis program di beberapa daerah, termasuk DIY.

"Kami belum tahu titik-titik mana saja di DIY yang akan menjadi sasaran program. Dari jumlah penerima hingga koordinasi teknis dengan pusat pun masih menunggu arahan lebih lanjut. Namun, kami terus berkoordinasi untuk memastikan DIY tidak tertinggal," ujar Ni Made.

Terkait alokasi anggaran, Ni Made memastikan bahwa dana Rp 42 miliar ini tidak menggeser program prioritas lain yang telah direncanakan.

"Kami tidak melakukan refokusung anggaran. Dana ini bersumber dari transfer dana pusat dan insentif fiskal yang tidak mengganggu program-program yang sudah ada dalam RKPD maupun KUA-PPAS," tegasnya.

Masih kurang

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah menyiapkan anggaran meski belum ada arahan dari pemerintah pusat. Alokasi pembiayaan diambil dari APBD 2025.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufik Amrullah, menjelaskan kebutuhan anggaran untuk program MBG dari APBD 2025 sekitar Rp29,5 miliar. "Yang tersedia kan Rp14,4 miliar, kekurangannya yang sekitar Rp15,1 miliar," jelas Taufik dihubungungi pada Senin (6/1).

Berdasarkan Rancangan APBD 2025 Kulon Progo, Rp14,4 miliar diambil dari pos Belanja Tak Terduga. Sedangkan kekurangan sekitar Rp15,1 miliar diambil dari pemangkasan anggaran untuk setiap OPD.

Menurut Taufik, setiap OPD harus memangkas anggaran belanjanya sampai 11 persen demi program MBG. Pemangkasannya diatur oleh masing-masing OPD. "Proses pemangkasannya mengacu pada pedoman dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," ujarnya.

Taufik menyatakan alokasi Rp29,5 miliar tersebut bisa tercapai untuk program MBG. Namun jika masih dirasa kurang mencukupi, maka refokusung perlu kembali dilakukan. (aka/han/als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005